

# Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PKn Sebagai Penguat Karakter Bangsa

**Harmanto**

PPKn FIS Universitas Negeri Surabaya

Korespondensi: Griya Kartika Blok C-8, Cemandi, Sedati, Sidoarjo. Email: armantofisunesa@gmail.com

**Endang Danial A.R.**

PKn FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia

Korespondensi: Jl. Dr. Setiabudhi 229 Bandung 40154. Email: endangdanial@gmail.com

**Abstract:** This study aims to examine, discover the basic ideas of the conceptual-theoretical framework and implementation anti-corruption education through the Citizenship Education as reinforcement learning nation's character. This study used a qualitative approach, data collection techniques with the documentation, interviews, and observation. These results indicate that the construction of civic education teachers about corruption and the corruption that contributed to the construction of the students, in addition to the influence of mass media and electronics. Factors supporting the character development of students through anti-corruption education is divided into two categories, namely internal and external. Syllabus development, indicators, goals, scenarios, learning resources, media, models, methods, learning strategies, and evaluation tools need to be repaired because there are many shortcomings to be able to strengthen the nation's character.

**Keywords:** anticorruption education, citizenship education, nations character

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menemukan ide-ide dasar kerangka konseptual-teoritis dan implementatif pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai penguat karakter bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi guru Pendidikan Kewarganegaraan tentang korupsi dan antikorupsi memberikan andil yang besar kepada konstruksi siswa, di samping pengaruh dari media massa dan elektronik. Faktor pendukung pembinaan karakter siswa melalui pendidikan antikorupsi dibagi menjadi dua golongan, yaitu internal dan eksternal. Pengembangan silabus, indikator, tujuan, skenario, sumber belajar, media, model, metode, strategi pembelajaran, dan alat evaluasi perlu diperbaiki karena masih banyak kekurangan untuk dapat memperkuat karakter bangsa.

**Kata kunci:** pendidikan antikorupsi, PKn, karakter bangsa

Dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan penegakkan hukum (*law enforcement*) semata, tetapi harus dihadapi dengan semangat dan atmosfer antikorupsi melalui pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menanamkan pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan (Hassan, 2004). Sekolah sebagai lingkungan kedua bagi siswa dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak. Caranya, sekolah memberikan nu-

ansa dan atmosfer yang mendukung upaya untuk menginternalisasikan nilai dan etika yang hendak ditanamkan, termasuk di dalamnya perilaku antikorupsi.

Pendidikan Antikorupsi (PAK) dapat dimasukkan dalam kurikulum sekolah, namun tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran. PAK dapat diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran yang sudah ada sehingga mampu mewarnai pola pikir, sikap, dan perilaku siswa. Untuk maksud tersebut dukungan kultur dan iklim sekolah sangat dibutuhkan terutama dalam

konteks penanaman nilai dan pembentukan karakter siswa. Salah satu mata pelajaran yang dapat mengintegrasikan PAK adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn menjadi sangat strategis di tengah upaya pemerintah dalam membangun karakter bangsa mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Dalam PKn akan ditanamkan nilai-nilai dan kompetensi baik menyangkut *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions/virtue* (Center for Civic Education, 1999). Bahkan Zuriyah (2011:1) menyatakan bahwa PKn menjadi instrumen fundamental dalam bingkai pendidikan nasional sebagai media pembentukan karakter bangsa. Urgensi pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan watak/perilaku antikorupsi sebagai pilar dalam pendidikan karakter bangsa karena upaya dilakukan pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi, mulai dari pembuatan berbagai peraturan, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan penegakan hukum belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. PAK di sekolah mengajak siswa secara sadar membangun mental bahwa korupsi adalah penyakit yang merugikan diri sendiri, masyarakat serta masa depan bangsa (Darmawan, 2010:3). PAK di sekolah tidak diarahkan pada upaya untuk melakukan gerakan praktis pemberantasan korupsi sebagaimana dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada penanaman pengetahuan dasar tentang korupsi dan antikorupsi, sikap, dan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, ketaatan terhadap peraturan sekolah, adil, kerja keras, sederhana, dan lain-lain.

Pandangan yang lebih eksplisit dalam kesimpulan penelitian disampaikan oleh *Center for Indonesian Civic Education* (2000: 43) bahwa *content for the new civic education should include key concepts such as democracy, good governance, anti-corruption, the constitutional, national identity, and civic value*. Hasil kesimpulan ini memberikan penguatan urgensi wawasan antikorupsi sebagai salah satu paradigma baru isi PKn. Rekomendasi *Center for Indonesian Civic Education* menjadi salah satu dasar dalam tujuan PKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu “berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta **antikorupsi**” (Permendiknas No. 22 Tahun 2006). Isi Permendiknas No. 22 Tahun 2006 menunjukkan betapa pentingnya PKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai wahana me-

nanamkan sikap dan perilaku antikorupsi yang selalu inheren dengan perikehidupan siswa saat ini dan yang akan datang.

Adanya PAK dalam pembelajaran PKn diharapkan mampu memberikan bekal awal tentang pengetahuan, pemahaman, dan akibat korupsi, sikap dan perilaku antikorupsi yang selalu terkonstruksi dalam diri siswa. Konstruksi siswa yang baik memandang korupsi sebagai bentuk kelainan, penyakit, dan sejenisnya sebagaimana dalam teori fungsional struktural yang disampaikan oleh Merton (1968, dalam Ritzer dan Goodman, 2003) tentang anomie yang diadopsi dari pandangan sosiolog dari Prancis Emile Durkheim. Anomie merupakan kesenjangan antara tujuan-tujuan sosial bersama dan cara-cara yang sah untuk mencapainya. Individu yang mengalami anomie akan berusaha mencapai tujuan bersama dari suatu masyarakat, namun tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan sah karena berbagai keterbatasan sosial. Akibatnya, individu akan memperlihatkan perilaku menyimpang untuk memuaskan diri sendiri. Anomie merupakan bentuk perilaku menyimpang karena adanya benturan dalam struktur sosial atau untuk mencapai tujuan tertentu melalui bentuk-bentuk yang menyimpang (Johnson, 1986:154). Hal ini mengisyaratkan bahwa korupsi dengan berbagai macam modus dan tujuannya merupakan bentuk anomie yang tidak dapat diterima oleh kebudayaan.

Salah satu upaya mencegah korupsi dan mengembangkan sikap antikorupsi melalui sekolah telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009. Upaya tersebut diawali dengan menyusun buku panduan PAK yang diberi nama Pendidikan Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Anti KKN). Sebagai *pilot project* ditetapkan tiga mata pelajaran yang mengintegrasikan PAK yakni PKn, Agama, dan Bahasa Indonesia, serta budaya sekolah yang disisipi dengan PAK mulai Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2009). Pilihan strategi untuk menanamkan nilai, pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui pendidikan didasari atas pemikiran bahwa sekolah adalah proses kebudayaan, sebagai lingkungan kedua bagi anak yang dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak. Oleh karena itu, jika sekolah dapat memberikan semangat dan atmosfer yang sengaja diciptakan untuk mendukung internalisasi nilai, sikap, dan perilaku antikorupsi, diyakini akan dapat memberikan sumbangan yang amat berarti bagi upaya menciptakan

generasi bangsa yang tangguh dan berperilaku antikorupsi kelak di kemudian hari.

PAK melalui pembelajaran PKn dan budaya sekolah yang telah dilaksanakan selama dua tahun belum dilakukan evaluasi, baik dari sisi kompetensi, bahan bacaan, strategi pembelajaran, evaluasi, dan iklim sekolah macam apa yang mampu memberikan kontribusi serta penguat terhadap PAK di sekolah. Upaya yang selama ini dilakukan sudah barang tentu masih diperlukan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam rangka memberikan saran, masukan, perbaikan, dan mempertahankan program yang sama di masa depan. Di sinilah urgensi studi evaluatif interpretivis terhadap pelaksanaan PAK melalui pembelajaran PKn di sekolah perlu untuk dilakukan. Untuk itu maka penelitian ini berupaya mengkaji, menemukan ide-ide dasar kerangka konseptual-teoritis dan implementatif PAK melalui pembelajaran PKn sebagai penguat dalam pembinaan karakter bangsa.

## METODE

Penelitian evaluasi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan evaluasi kualitatif ditempuh dengan pertimbangan sebagai upaya pengembangan program terutama dari sisi proses perencanaan dan penerapan serta “menjaga agar tetap *naturalistik* yang berguna untuk mengkaji implementasi program” (Patton, 2009:13). Dengan penelitian evaluatif dapat diketahui, dievaluasi, dan dinilai berdasarkan dampak serta hasil aktualnya, bukan semata-mata tujuan yang diinginkan sebelumnya (Scriven, 1967 dalam Denzin dan Lincoln, 2009:702). Apa yang terjadi dalam program sering kali bervariasi seperti halnya perubahan kondisi, perbedaan lokasi, pelaksanaan di lapangan, atau hal lain yang tidak dapat diramalkan atau diantisipasi sepenuhnya.

Dalam penelitian evaluatif ini peneliti menggunakan metode interpretivis karena selalu berhubungan dengan kontekstualisasi makna dan realitas sosial selalu dikonstruksi secara sosial pula (Denzin dan Lincoln, 2009:704) berdasarkan atas interpretasi dan re-interpretasi secara konstan dari semua intensional, perilaku manusia yang bermakna, termasuk perilaku peneliti (Smit, 1989:85). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan setelah mendapatkan data dokumentasi yang diperlukan. Teknik wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data tentang pandangan, pengalaman

guru PKn, dan siswa tentang pelaksanaan PAK melalui pembelajaran PKn. Sedangkan pandangan, pengalaman, pendapat kepala sekolah difokuskan pada visi, misi, budaya sekolah, dan kebijakan-kebijakan yang mendukung pelaksanaan PAK di sekolah. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data tentang kondisi riil berbagai rupa kejadian, peristiwa, keadaan, tindakan terpola (Bungin, 2005:65) yang difokuskan pada strategi guru mengelola kelas, interaksi guru-siswa, siswa-siswa, dan aktivitas selama pembelajaran berlangsung. Budaya sekolah yang dimanifestasikan melalui perilaku warga sekolah, kantin kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab diduga mendukung pelaksanaan PAK. Dalam kaitan dengan observasi ini maka peneliti menempatkan dirinya sebagai observer partisipatif. Cara pengumpulan data yang ketiga adalah catatan dan dokumen, yang diperlukan untuk membantu dalam melakukan analisis. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dokumen internal yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) visi, misi, program kerja, dan kebijakan sekolah serta (2) silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PKn yang disusun guru. Dokumen formal yang dimanfaatkan meliputi: (1) Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar Isi khususnya pada mata pelajaran PKn jenjang SMP/MTs, (2) Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan khususnya pada mata pelajaran PKn jenjang SMP/MTs, (3) dokumentasi lain yang dipandang perlu sebagai implementasi PAK di sekolah. Agar memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam penelitian ini upaya yang akan dilakukan adalah memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan baik pada saat wawancara maupun observasi, melakukan triangulasi baik metode maupun sumber data, melibatkan teman sejawat yang tidak ikut penelitian, dan melakukan analisis negatif.

Kriteria yang digunakan untuk mendapatkan informasi adalah *setting, actors, process* (Miles dan Huberman, 1993:56). Latar (*setting*) berkaitan dengan situasi dan tempat berlangsungnya pengambilan data, yakni di dalam kelas pada saat pembelajaran berlangsung maupun di luar kelas. Pelaku (*actors*) yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah guru PKn, kepala sekolah, penanggung jawab kantin kejujuran, dan siswa SMP. Sedangkan kriteria proses (*process*) adalah wawancara dan observasi antara peneliti dengan subjek/aktor berkaitan dengan fokus

masalah penelitian ini. Lokasi penelitian di SMPN A (Surabaya), SMPN B (Lamongan), SMPN C (Pasuruan), SMPN D (Malang), SMPN E (Mojokerto), dan SMPN F (Madiun). Pemilihan lokasi dipilih atas pertimbangan bahwa lokasi penelitian tersebut ada kaitan kejujuran dan kesediaan dalam memberikan informasi terkait dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru PKn, penanggung jawab kantin kejujuran dan siswa.

Tahap-tahap analisis data secara umum dilakukan dengan cara membuat manajemen data secara pragmatis yakni langkah-langkah yang diperlukan untuk mengolah kumpulan data secara sistematis dan koheren (Huberman dan Miles, 2009:591). Jika data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi telah terkumpul akan dilakukan reduksi data, artinya data yang demikian banyak disederhanakan berdasarkan kerangka kerja konseptual, pertanyaan penelitian, kasus, instrumen penelitian yang digunakan. Data yang telah terkumpul dirangkum, diberi kode, dirumuskan berdasarkan tema, dikelompokkan, dan disajikan secara tertulis. Setelah itu, dilakukan penyajian data sebagai informasi padat terstruktur yang memungkinkan untuk diinterpretasi dan disimpulkan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian evaluasi adalah analisis isi, domain, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Ketiga analisis data di atas dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah analisis induktif sebagaimana yang disampaikan oleh Patton (1990:390) bahwa *inductive analysis means that the patterns, themes, and categories of analysis come from the data, they emerge out of the data rather than being imposed on them prior to data collection and analysis*. Ini berarti bahwa dalam analisis induktif mencakup pola-pola, tema, dan kategori-kategori yang berasal dari data yang telah dikumpulkan agar bermakna baik.

## HASIL

Dalam pandangan kepala sekolah, korupsi di Indonesia sudah sampai pada tahap membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

*Kami benar-benar miris (merinding) melihat korupsi di Indonesia yang melibatkan para pejabat yang nilainya tidak tanggung-tanggung, luar biasa besarnya dan terjadi di semua kementerian, tanpa terkecuali. Termasuk di lingkungan kementerian agama yang notabene merupakan lembaga yang identik dengan urusan iman, taqwa, dosa, pahala,*

*surga, dan neraka. Pejabat tinggi banyak yang melakukan korupsi maka secara otomatis akan ditiru pejabat yang di bawahnya.* (Sumber: hasil wawancara dengan kepala sekolah: diolah).

Pernyataan yang tidak jauh berbeda disampaikan guru PKn, bahkan lebih detail dalam menyikapi. *Kami sangat heran dengan fenomena korupsi di Indonesia, semakin hari bukannya berkurang tetapi semakin bertambah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hukuman yang dijatuhkan ternyata tidak memberi efek jera pelaku korupsi. Pemerintah segera meninjau ulang hukuman bagi koruptor. Misalnya, orang yang telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi dengan kerugian di atas 10 milyar rupiah perlu dihukum mati atau dimiskinkan atau perlu diberi cap (label) sebagai teroris berdasi. Pemberian hukuman mati dan label sebagai teroris, setidaknya kalau mau korupsi akan berpikir ulang, karena akibat perbuatan itu bukan saja bagi dirinya tetapi juga keluarga. Bayangkan bagaimana keluarga kita kalau diberi label sebagai teroris berdasi. Pemiskinan penting, supaya setelah keluar dari penjara masih merasakan akibat dari korupsi. Kami melihat banyak koruptor masih hidup bergelimang harta setelah keluar dari penjara. Ia masih dapat hidup dengan layak meskipun telah dipecat. Bahkan juga hidup dengan terhormat. Ini kan menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan sama sekali tidak memberikan efek jera.* (Sumber: hasil wawancara dengan guru PKn: diolah).

Masyarakat juga memberikan andil yang cukup besar dalam menyuburkan praktik korupsi di Indonesia. Indikator yang nampak misalnya, (1) memberi uang kepada oknum polisi karena melanggar peraturan lalulintas, ia tidak mau mengikuti prosedur resmi dengan cara menghadiri sidang di pengadilan, (2) banyak orang yang mengambil jalur pintas agar lebih cepat pada saat mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) melalui oknum petugas, dan lain-lain.

Kepala sekolah dan guru PKn sepakat bahwa upaya penegakkan hukum yang menekankan aspek sanksi saja tidak cukup, tetapi harus diimbangi dengan upaya lain melalui PAK. PAK dapat dimasukkan dalam kurikulum sekolah yang tertintegrasi maupun berdiri sendiri sebagai mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang dapat mengintegrasikan PAK di sekolah adalah PKn. Seperti halnya *pilot project* PAK jenjang SMP di Jawa Timur yang sudah berjalan sejak tahun 2009 terintegrasi pada mata pelajaran PKn kelas VIII, dalam bentuk kantin kejujuran, dan

budaya sekolah. Pada mata pelajaran PKn kelas VIII semester gasal secara eksplisit ada Kompetensi Dasar (KD) yang berkaitan dengan korupsi dan anti-korupsi.

Pengembangan rumusan tujuan PAK dalam RPP pada pelajaran PKn, kelas VIII semester gasal jenjang SMP, dapat dilihat pada Tabel 1.

Sumber belajar siswa dalam PAK melalui pembelajaran PKn yakni Buku Sekolah Elektronik (BSE), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan koran, yang digunakan di seluruh lokasi penelitian ini. SMPN B, SMPN C, dan SMPN D, menggunakan sumber tambahan berupa peraturan perundang-undangan. SMPN A dan SMPN F menambahkan internet sebagai sumber belajar, dengan meminta siswa secara mandiri melakukan *browsing* dan mengunduh sebagai salah satu tugas. Tidak satupun guru PKn mengembangkan secara khusus materi korupsi dan antikorupsi yang digunakan untuk kalangan internal sekolah. Alasan yang disampaikan antara lain kurang mampu, tidak mempunyai waktu, tidak efisien, dan sumber belajar yang

ada sudah banyak sehingga tinggal memanfaatkan saja. Ada dua sekolah (SMPN B dan SMPN D) menggunakan sumber belajar media elektronik, namun tidak disebutkan secara terperinci dalam RPP. Ketika ditanyakan kepada guru PKn, ia memberikan klarifikasi yang dimaksud dengan sumber belajar elektronik adalah berita atau acara yang menyajikan kasus korupsi dari berbagai stasiun televisi. Sumber belajar ini biasanya digunakan oleh guru untuk memberikan gambaran, contoh, atau memperkuat konsep tentang korupsi dan antikorupsi di luar buku paket.

Model dan metode PAK dalam pembelajaran PKn cukup bervariasi seperti pada Tabel 2, sementara aktivitas di dalam kelas dapat dilihat pada Tabel 3. PAK dalam pembelajaran PKn juga dilakukan asesmen untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan. Teknik asesmen yang dikembangkan guru PKn dapat dilihat pada Tabel 4.

Pembelajaran PKn pada topik korupsi dan anti-korupsi di kelas VIII semester gasal, mampu memberikan bekal pengetahuan yang memadai bagi siswa

**Tabel 1. Tujuan PAK dalam Pembelajaran PKn Kelas VIII yang Dikembangkan Guru pada KD 3.4 dan 3.5**

Sekolah	Kognitif						Jml
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	
SMP A	4	3	-	1	-	-	8
SMP B	3	5	1	2	-	-	11
SMP C	4	-	-	-	-	-	4
SMP D	3	5	1	2	-	-	11
SMP E	1	2	2	-	-	-	5
SMP F	2	2	1	1	-	-	6
Jumlah	17	17	5	6	0	0	45

**Keterangan:**

Sumber: data dokumentasi: diolah

C1, C2, dst. : tingkatan kognitif

A1, A2 dst. : tingkatan afektif

**Tabel 2. Model dan Metode dalam PAK melalui Pembelajaran PKn**

Sekolah	Model dan Metode yang Digunakan da				
	Ceramah	Tanya Jawab	Diskusi Kelas	Penu-gasan	Koo-per
SMP A	V	V	V	-	V
SMP B	V	V	V	V	V
SMP C	V	V	-	V	-
SMP D	V	V	V	V	-
SMP E	V	V	V	V	-
SMP F	V	V	V	-	-

Sumber: data dokumentasi: diolah

**Tabel 3. Aktivitas PAK dalam Pembelajaran PKn**

Sekolah	Aktivitas Siswa dalam PA			
	Dengarkan Penjelasan guru	Tanya Jawab	KerjakanLK S	Diskusi Kelp.
SMP A	V	V	V	-
SMP B	V	V	-	V
SMP C	V	V	V	V
SMP D	V	V	-	V
SMP E	V	V	-	V
SMP F	V	V	V	V

Sumber: data dokumentasi:diolah

**Tabel 4. Teknik Asesmen PAK dalam Pembelajaran PKn**

Sekolah	Teknik Asesmen				
	Subjektif	Objektif	Lisan	Projek	Unju Kerj
SMP A	V	V			
SMP B	V	-	-	V	V
SMP C	V	-	-	V	-
SMP D	V	-	-	V	V
SMP E	V	-	-	-	V
SMP F	V	-	-	-	-

Sumber: data dokumentasi:diolah

SMP. Hal ini terlihat saat wawancara, mereka dengan lancar dan percaya diri memberikan penjelasan secara lisan tentang pengertian korupsi, sebab-sebab korupsi, dan sikap yang jelas berkaitan dengan korupsi di Indonesia. Siswa memaknai korupsi lebih banyak pada aspek legal formal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

*Korupsi merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara, mengambil dari negara yang bukan menjadi haknya, terlambat mengajar itu sebenarnya juga korupsi. Tindakan mengambil uang/ba-rang yang bukan menjadi haknya yang merugikan negara untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, menyontek termasuk bagian dari korupsi. Menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan atau keuntungan pribadi dan merugikan keuangan negara. Tindakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan, memperkaya diri sendiri yang dilakukan secara disengaja dan merugikan kepentingan atau keuangan negara* (Hasil wawancara dengan siswa: data diolah).

Bagi siswa SMPN A, C, D, F pengertian korupsi lebih banyak dipengaruhi oleh informasi yang disajikan oleh guru maupun dari buku paket PKn kelas VIII. Sedangkan bagi siswa SMPN B dan E, memberikan definisi bahwa tindakan menyontek juga merupakan korupsi. Hal ini karena di SMPN B menyontek

dipahami sebagai tindakan korupsi dan mendapatkan sanksi yang sangat tegas yakni kertas ujian disobek lima menit sebelum ulangan berakhir setelah mendapatkan peringkat terlebih dahulu. Pemahaman siswa di SMPN A, B, C, D, E, dan F tentang contoh korupsi di Indonesia sebagian besar diperoleh melalui pembelajaran PKn dan media cetak dan elektronik serta internet. Ketika ada kasus-kasus korupsi besar yang diberitakan secara terus menerus melalui televisi mempunyai pengaruh setidaknya pada pengetahuan siswa, misalnya kasus Gayus Tambunan. Siswa justru lebih paham kasus Gayus Tambunan dibandingkan kasus-kasus korupsi di daerah (lokal) yang tidak diberitakan melalui televisi.

Dalam pandangan siswa, ada dua faktor orang melakukan korupsi, *pertama*, dorongan pribadi. Dorongan pribadi muncul karena kurangnya pengamalan agama secara benar (kurangnya rasa keimanan), keinginan kaya dengan cara yang mudah dan cepat. *Kedua*, berasal dari pengaruh lingkungan kerja, sistem, dan kesempatan. Bagi siswa, antikorupsi dimaknai sebagai: (1) sikap mencegah korupsi yang dimulai hal-hal sederhana, dari diri sendiri seperti disiplin, (2) bertindak jujur apa yang menjadi hak dan yang bukan menjadi hak kita, (3) berani melaporkan apabila ada tindakan korupsi yang dilakukan oleh siswa. Misalnya,

tidak membayar di kantin, menyontek, berbohong dan lain-lain, (4) cara mencegah agar tidak melakukan korupsi, apapun bentuknya, (5) sikap menentang segala bentuk korupsi, mulai dari yang sederhana seperti jujur, malu jika terlambat atau berbohong sampai dengan melaporkan ke pihak yang berwajib jika diperlukan bila ada korupsi di sekolah yang dilakukan oleh guru atau kepala sekolah.

Sikap siswa melihat kondisi korupsi di Indonesia sudah melampaui batas kewajaran. Siswa memberikan indikator ketidakwajaran kondisi korupsi di Indonesia seperti: (1) jumlah yang dikorupsi sudah sangat banyak sehingga akan dapat merugikan keuangan negara, (2) dilakukan oleh para pejabat negara yang seharusnya memberikan contoh pada rakyat, (3) setiap kantor/kementerian selalu ada kasus korupsi. Ketika ditanyakan tentang wacana memiskinkan koruptor mereka masih mengalami kebingungan, karena merasa tidak pernah mendapatkan informasi tentang hukuman dengan cara membuat miskin bagi koruptor. Akan tetapi mereka menyatakan ketidaksetujuannya bila koruptor dihukum mati. Mereka berargumen bahwa hukuman mati bagi koruptor merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ketika disodorkan sebuah pertanyaan tentang *andai orang tua Anda hanya sebagai seorang pegawai biasa dengan gaji yang tidak terlalu besar tetapi tiba-tiba mampu membeli rumah dan mobil yang bagus, padahal tidak mempunyai penghasilan selain dari gaji. Apa yang akan Anda lakukan?* Jawaban atas pertanyaan tersebut, ada dua macam pandangan. *Pertama*, berani menanyakan langsung kepada orang tua dengan bahasa yang sopan tentang asal uang yang digunakan untuk membeli rumah dan mobil tersebut. *Kedua*, tidak berani menanyakan langsung tetapi melalui perantara kakak atau ibu untuk menanyakan kepada orang tua (ayah). Alasan mereka berani menanyakan karena jika benar bahwa uang yang diperoleh berasal dari korupsi bukan saja orang tua akan berusaha dengan masalah hukum akan tetapi mereka akan mendapatkan rasa malu besar di sekolah maupun di masyarakat. Rupanya mereka sering membaca di koran bagaimana anak seorang koruptor diejek dan dijauhi oleh teman-temannya.

PAK di sekolah akan berhasil apabila didukung oleh nilai-nilai tertentu yang dihabituisasikan melalui budaya sekolah. Kantin kejujuran masih menjadi pilihan utama bagi sekolah untuk menghabituisasikan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, dan rasa memiliki. Semua sekolah yang menjadi lokasi

penelitian ini mempunyai kantin yang ditunjuk oleh oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berdasarkan atas permintaan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur pada tahun 2009. Kejati Jawa Timur memberikan modal awal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membuat atau membuka kantin kejujuran di sekolah. Selama kurun waktu tahun 2009-2011, model pengelolaan kantin kejujuran dibagi menjadi dua macam, yakni semi terbuka dan terbuka penuh. Kantin model semi terbuka dengan variasi (1) siswa mengambil barang kemudian membayar dengan uang pas sesuai dengan harga barang dan tidak bisa mengambil uang kembalian, seperti di SMPN A, (2) siswa menyerahkan uang dulu kepada petugas jaga, jika uang untuk membeli memerlukan uang kembali, tetapi jika menggunakan uang yang sesuai dengan harga barang, pembeli tinggal memasukan uang pada tempat yang telah disediakan (dibuat seperti kotak amal di masjid), seperti di SMPN B, (3) Siswa memasukan uang ke tempat yang telah disediakan, kemudian meminta kepada petugas untuk mengambil barang, seperti di SMPN F. Di SMPN F, kantin kejujuran tidak menjual makanan ringan karena menjadi sekolah sehat nasional. Jadi yang dijual makanan yang tidak menggunakan pembungkus plastik, seperti bakso, siomai, soto ayam, nasi pecel sehingga memang penjual yang harus mengambilkan. Tetapi jika yang dibeli pisang goreng, ketela goreng, dan sejenisnya maka dapat mengambil sendiri. Terbuka penuh, yakni pembeli secara bebas dapat mengambil barang, menyerahkan uang, dan mengambil uang kembalian secara mandiri (*self service*). Kantin tidak ada yang menjaga dan hanya dicek petugas pada pagi dan siang hari, seperti di SMPN C, D, dan E.

Berdasarkan atas laporan keuangan selama kurun waktu 2009-2011 kantin yang masih bertahan dan mendapatkan keuntungan di SMPN A, di SMPN B, SMPN C, SMPN E, dan SMPN F. Sedangkan di SMPN C selama periode 2009-2010 mengalami kerugian dan pada tahun 2001 grafik keuntungan mulai terlihat. Di SMPN D di samping mengalami kerugian juga tidak ada lagi aktivitasnya. Budaya lain yang dikembangkan di semua sekolah yang menjadi lokasi penelitian ini yang mendukung PAK adalah pengadanan kas kelas dan disiplin. Sedangkan di SMPN B dikembangkan budaya antimenyontek. Dalam pelaksanaan budaya antimenyontek didukung penuh semua guru dan tidak ada toleransi terhadap perilaku kecurangan pada saat ujian. Jika kedatangan siswa menyontek pada saat ulangan harian, ujian tengah maupun

akhir semester, lima menit sebelum waktu habis menjaga ujian/guru menyobek lembar jawaban dan diberikan kesempatan untuk mengerjakan lagi dalam sisa waktu yang ada dan tidak ada tambahan.

## PEMBAHASAN

Kepala sekolah dan guru PKn sepakat bahwa saat ini korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan bukan saja jumlah kerugian yang besar tetapi telah mengurat akar atau membudaya dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping memberikan hukuman yang setimpal, dalam pandangan guru PKn para koruptor layak untuk dimiskinkan sebagai bentuk keadilan yang berperikehidupan karena dampak yang ditimbulkan demikian besar maka secara otomatis pemberian efek jera pun juga menyentuh perikehidupan koruptor. Temuan ini sangat menarik karena konstruksi guru PKn tentang korupsi mempunyai dimensi yang luas, sampai dengan dimensi konseptual-teoritis.

Dimensi konseptual-teoritis ditunjukkan pada urgensi memberikan hukuman dengan cara memiskinkan koruptor. Memang tidak ada dalam peraturan yang memberikan sanksi dengan cara memiskinkan bagi koruptor. Dalam konteks ini, guru PKn memaknai hukum bukan saja sebagai kaidah positif, legal formal, legalistik-positivistik dengan “teleskop perundang-undangan” (Rahardjo, 1999:142), namun meletakkan pada konteks sosial yang lebih besar. Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai suatu institusi yang esoterik dan otonom namun sebagai bagian dari proses sosial yang lebih besar (Rahardjo, 1999:4). Jika korupsi hanya dimaknai sebagai bentuk perbuatan yang melanggar kaidah legal formal, hukuman fisik dan denda merupakan balasan yang wajar. Kondisi ini tentu tidak akan mampu mencerminkan perspektif kepentingan yang lebih luas dalam pemberantasan korupsi. Konstruksi guru PKn dalam konteks pemberantasan korupsi juga telah menyentuh aspek pemaknaan hukum sampai pendulum yang mengarah pada teori tatanan kebajikan. Konstruksi pada tatanan kebajikan ditunjukkan dengan kesediaan dan menerima PAK sebagai kurikulum wajib di sekolah. Hal ini karena PAK sebagai upaya untuk mengembangkan rasa *arete* sebagai warga negara.

Pemaknaan korupsi guru PKn berdimensi kultur, struktur, dan anomie sekaligus. Kultur sebagai perangkat nilai normatif yang terorganisir, yang menentukan perilaku bersama anggota masyarakat atau

anggota kelompok (Merton, 1968 dalam Ritzer dan Goodman, 2003:142). Menurut kepala sekolah dan guru PKn, korupsi telah menjadi budaya karena terjadi tingkat pusat sampai di daerah. Masyarakat ternyata juga memberikan andil dalam menyuburkan praktik korupsi, seperti: (1) memberi uang pada oknum polisi karena melanggar peraturan lalulintas, (2) mengambil jalur pintas agar lebih cepat pada saat mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) melalui oknum petugas, dan lain-lain. Praktik korupsi di atas dalam pandangan guru dan kepala sekolah merupakan bentuk kultur karena terorganisasi dengan baik yang melibatkan struktur. “Struktur sosial dimaknai sebagai seperangkat hubungan sosial yang terorganisir dengan berbagai macam cara melibatkan anggota masyarakat atau kelompok di dalamnya” (Merton, 1968 dalam Ritzer dan Goodman, 2003:142). Pemaknaan korupsi dalam perspektif teori hukum dan sosiologi oleh guru PKn diperkuat dengan pentingnya PAK di sekolah karena merupakan fungsi pendidikan dalam rangka mengkonstruksi perilaku dan sebagai gerakan budaya. Budaya memberikan kerangka berpikir bagi manusia. Sesuatu dipandang salah atau benar bergantung pada sudut pandang yang dipergunakan.

Lembaga yang menempati posisi strategis dalam pengembangan budaya antikorupsi adalah sekolah. Hal ini karena “fungsi pendidikan adalah untuk melakukan koreksi budaya” (Eby, 1952, dalam Darmawan, dkk, 2008; Hassan, 2004; Muhari, 2004; Zuriyah, 2008), yaitu koreksi terhadap budaya tidak baik yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pentingnya PAK di sekolah sejalan dengan pandangan yang dikemukakan Heyneman (2002:75) bahwa *...public good nature of education and education's role in affecting social cohesion because education serves as a way of modeling good behavior for children or young adults, allowing an education system to become corrupt may be more costly than allowing corruption in the customs service or the policy*. Sementara dalam pandangan Gugur dan Shah (2002) untuk mereduksi korupsi dalam suatu negara diperlukan adanya partisipasi warganegara dalam berbagai bentuk seperti mendirikan LSM, melakukan advokasi, berpendapat melalui media, melalui sekolah sehingga menumbuhkan kepekaan jika terjadi korupsi. Pandangan yang berbeda disampaikan Quah (2002) untuk pemberantasan korupsi perlu tiga model: (1) *anti-corruption legislation with no independent agency*, (2) *anti-corruption*

*legislation with several agencies, (3) anti-corruption legislation with an independent agency.* Model yang dikembangkan Quah (2002) menekankan pada aspek penegakkan hukum melalui pembentukan undang-undang dan lembaga pemberantasan korupsi yang independen. Hasil penelitian yang dilakukan Jain (2001) bahwa sikap antikorupsi harus dibangun dari proses: (1) interaksi pemimpin pilihan rakyat dengan birokrat, (2) interaksi antara birokrat dengan anggota legislatif, (3) interaksi antara birokrat dengan rakyat. Dalam pola interaksi di atas terjadi peluang *bureaucratic corruption* atau korupsi birokrasi. Warganegara harus diberi pemahaman bahwa interaksi-interaksi itulah yang menjadi pangkal terjadinya korupsi.

Hasil penelitian serupa juga dilakukan oleh Svensson (2005); Tella dan Ades (2007) dalam memerangi korupsi harus menggunakan pendekatan penegakkan hukum yakni dengan mengedepankan peraturan perundang-undangan yang sangat rinci dan jelas yang dilengkapi dengan penegakan secara ketat. Penelitian Svensson (2005); Tella dan Ades (2007) sama-sama memberikan contoh riil yang berhasil menggunakan pendekatan ini, yakni Hong Kong dan Singapura. Secara kebetulan kedua negara tersebut memiliki kesamaan dengan wilayah dan jumlah penduduk yang kecil serta sektor ekonomi utama adalah perdagangan. Dari sisi politik pun juga dianggap sebagai negara yang bukan demokrasi. Hasil penelitian Svensson (2005) dan Tella dan Ades (2007), dikritik Wijayanto (2009:44) bahwa pendekatan penegakkan hukum belum tentu cocok diterapkan di Indonesia, karena dengan tindakan represif di negara demokrasi bukan tidak mungkin akan mengundang protes, belum lagi ditambah dengan kondisi yang begitu kompleks dan beragam seperti Indonesia merupakan tantangan yang tidak mudah. Pengembangan pendekatan yang lain seperti *bussinesman approach, market or economist approach, cultural approach* mutlak diperlukan. PAK di sekolah merupakan bentuk *cultural approach* dalam rangka pencegahan korupsi. Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, pembentukan lembaga yang idependen, pengawasan keuangan oleh BPK, pengawasan pemerintahan oleh DPR, pembuatan peraturan perundang-undangan, dan adanya LSM-LSM yang bergerak di bidang antikorupsi masih belum menunjukkan hasil yang mengembirakan. Untuk itu perlu diimbangi dengan langkah alternatif pencegahan melalui sekolah sebagai gerakan budaya antikorupsi. PAK di sekolah merupakan pendekatan yang relatif efisien dalam hal pen-

danaan, namun sulit diharapkan hasilnya dalam waktu yang singkat. Akan tetapi apabila pendekatan dengan menggunakan jalur pendidikan ini berhasil, berimplikasi dalam jangka panjang (Supardan, 2009:115). Ketika masyarakat menganggap bahwa korupsi sebagai aib, mereka akan banyak berperan dalam menekan tingkat korupsi.

Dalam menanggapi model PAK di sekolah, khususnya pada jenjang SMP belum ada kesepakatan. Ada dua model yang masih menjadi perdebatan yakni inklusif dan eksklusif. Masing-masing model mempunyai kelebihan dan kekurangan, namun saat ini yang mempunyai peluang adalah model inklusif. Melalui model inklusif memberikan kemudahan bagi siswa karena topik korupsi akan dikaji dari sudut pandang berbagai mata pelajaran. Siswa akan memperoleh pengalaman yang lebih komprehensif sekaligus memberikan wahana menyelesaikan masalah dari berbagai perspektif disiplin ilmu. Misalnya, mata pelajaran PKn akan mengkaji korupsi dari prespektif hukum positif dan moral, Agama akan melihat dari sisi hukum-hukum agama, sementara mata pelajaran IPS akan melihat dari sisi dampak sosial. Pada mata pelajaran bahasa akan memandang dari sisi sastra, misalnya membuat esai tentang korupsi, membuat surat kepada koruptor, puisi tentang korupsi dan antikorupsi. Mata pelajaran Seni dan Budaya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menciptakan karya seni dengan tema seputar korupsi dan antikorupsi, misalnya dengan membuat karikatur. Mata pelajaran IPA dapat melakukan kegiatan yang berbasis pada nilai kejujuran, misalnya praktikum di laboratorium. Jika hendak mengintegrasikan PAK melalui mata pelajaran tertentu hal penting yang harus dipersiapkan adalah mengembangkan RPP.

RPP PAK dalam PKn jenjang SMP yang dikembangkan guru kurang mampu mewujudkan tiga dimensi kompetensi PKn yakni *civic knowledge, skill, dan dispositio/virtue*, khususnya berkaitan dengan korupsi dan antikorupsi. Tujuan kognitif dan afektif masih dalam tingkatan rendah (C1 dan C2), yang didominasi informasi verbal dan penerimaan serta partisipasi saja. Merujuk pada teori hasil belajar Gagne (1988:54-60) tujuan pembelajaran yang dikembangkan guru menekankan *intelektual skill* pada jenjang *discrimination, concrete concept, dan rule using*, tetapi belum sampai *problem solving*. Anderson (1985:17) memberinya istilah "*declarative knowledge*" sehingga lebih banyak bernuansa mengetahui informasi "apa, kapan, dimana, dan siapa", belum

mencapai pada tataran “mengapa, bilamana, dan seandainya”. Dalam pandangan Komalasari dan Budimansyah (2008:93) untuk mencapai tujuan PKn jenjang SMP diperlukan keseimbangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuan kognitif harus lebih banyak penerapan, analisis-sintesis bahkan sampai kreativitas sesuai dengan perkembangan intelektual siswa SMP, bukan hanya pada pengetahuan dan pemahaman. Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak ada guru PKn yang secara khusus mengembangkan materi/bahan ajar/bahan bacaan siswa berkaitan dengan topik korupsi dan antikorupsi yang die-laborasi dari berbagai sumber.

Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan menjadi pilihan yang pertama dan utama dalam PAK melalui pembelajaran PKn. Meskipun ada yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, namun masih kurang tepat secara konseptual dalam menuliskan langkah-langkah maupun dalam praktiknya. Tanya jawab, diskusi, dan penugasan lebih banyak mengerjakan LKS dibandingkan dengan melakukan aktivitas konstruktif untuk menggali pengetahuan atau menguji berbagai hipotesis. Padahal aktivitas yang demikian sangat penting dalam rangka memberikan pengalaman nyata kehidupan kemasyarakatan dalam koridor psikopedagogis-konstruktif (Budimansyah, 2008:190), sementara Kerr (1999:15-16) menyebut sebagai ... *involves student learning by doing, thought active, partisipative experiences in the school or in local community and beyond*. Aktivitas guru dan siswa dalam PAK melalui pembelajaran PKn terdapat persamaan di semua sekolah khususnya pada kegiatan pembuka dan penutup. Kegiatan pembuka selalu diawali dengan absensi, kebersihan kelas, mengecek persiapan siswa untuk belajar, dan menyampaikan kompetensi yang hendak dicapai. Beberapa guru PKn memberikan apersepsi dengan menyampaikan pertanyaan. Tidak satu pun guru PKn menyampaikan cerita pendek yang berisikan pesan-pesan moral yang terkait dengan materi, memberikan ilustrasi gambar, membacakan puisi, konflik dalam suatu peristiwa, stimulus atau kegiatan refleksi lain dalam kegiatan awal. Stimulus dalam kegiatan awal penting dalam pembelajaran PKn untuk membangkitkan afektif siswa dan sebagai prakondisi refleksi siswa akan nilai-nilai yang dapat diambil pelajaran dari materi yang sedang dipelajari. Dalam kegiatan penutup selalu diakhiri dengan membuat kesimpulan yang difasilitasi guru dan memberikan tugas yang harus dikerjakan siswa. Belum ada guru yang

meminta siswa untuk melakukan refleksi dengan memberikan pertanyaan yang bersifat menggali nilai atau untuk mengetahui lebih lanjut.

Teknik asesmen yang digunakan dalam PAK melalui pembelajaran PKn di semua sekolah menggunakan tes tulis dalam bentuk subjektif. Hanya dua sekolah yang menggunakan non tes yakni produk/proyek dan *performance*, namun tidak dilengkapi dengan rubrik yang memadai sehingga ada kecenderungan unsur subjektivitas guru lebih menonjol. Tidak satupun guru PKn yang mengembangkan teknik *self* maupun *peer* asesmen. Sebenarnya guru PKn tahu tentang *self* maupun *peer* asesmen, tetapi masih mengalami kebingungan dalam membuat dan menerapkan pada SK dan KD mana saja yang cocok. Penilaian diri adalah suatu teknik di mana siswa diminta untuk menilai diri sendiri berkaitan dengan status, proses, sikap, pandangan, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari (Rusijono, *et al*, 2010). Penggunaan teknik ini dapat memberi dampak positif terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Keuntungan penggunaan penilaian diri dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya, dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur.

Konstruksi siswa tentang korupsi dan antikorupsi dipengaruhi guru, media massa, dan internet. Guru mempunyai peran sebagai agen untuk memengaruhi pandangan siswa tentang korupsi dan antikorupsi. Dalam konteks PAK sebagai penguat karakter siswa, teladan kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan petugas kebersihan merupakan salah satu aspek penting, sebagaimana pandangan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantoro yaitu *ing ngarso sung tulodho* (di depan memberikan contoh). Lickona (1991: 76) memberikan istilah keteladanan sebagai “*value are caught*”, artinya nilai-nilai yang dilakukan anak pada dasarnya berasal dari (contoh) guru atau orang tuanya. Oleh karena itu, PAK di sekolah tidak cukup dengan membekali dengan seperangkat teori, tetapi lebih dari itu, bagaimana guru dapat menjadi idola perilaku bagi siswa. Dalam rangka membina karakter siswa guru harus menampilkan seorang yang berkarakter terlebih dahulu. Jangan berharap siswa dapat berkarakter jika guru tidak menampilkan perilaku yang berkarakter pula.

Pengaruh media massa dan internet turut memberikan andil dalam konstruksi siswa tentang korupsi. Indikator yang nampak bahwa siswa lebih paham pada kasus-kasus korupsi yang dimuat di koran dan

di internet maupun dalam tayangan televisi dibandingkan yang terjadi di daerah namun tidak diberitakan di media massa dan elektronik. Gejala ini harus ditangkap guru PKn agar dapat memanfaatkan sumber belajar di luar buku teks maupun LKS. Pemanfaatan lingkungan dan media massa harus dilakukan secara selektif agar tidak menimbulkan salah tafsir maupun antipati sikap siswa kepada pemerintah. Hal ini karena seringkali tayangan di media massa tidak dilakukan pengontrolan untuk siapa pemirsa atau pembaca. Semua isi dan tayangan disuguhkan secara terbuka ke hadapan siswa secara langsung. Untuk itu peran guru sebagai penengah dan memberikan arahan yang lebih bijaksana sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan sikap frustrasi, antipati, pesimisme terhadap usaha yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025, dengan menempatkan media massa dan elektronik sebagai salah satu sasaran dalam pembangunan karakter bangsa sudah tepat. Hal ini karena media massa merupakan sebuah fungsi dan sistem yang memberi pengaruh sangat signifikan terhadap publik, khususnya terkait dengan pembentukan nilai-nilai kehidupan, sikap, perilaku, dan kepribadian (Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025), termasuk didalamnya nilai-nilai antikorupsi. Interventif terhadap media massa dan elektronik menjadi sangat penting di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa konten dalam media massa seringkali tidak mampu disensor sehingga sulit untuk melakukan kontrol kesesuaian acara dengan kepentingan siswa. Peristiwa anarkis, kekerasan, penghujatan, kebencian, dan lain-lain seringkali hadir dalam pandangan siswa secara langsung. Pendampingan dari orang tua yang diperkuat dengan arahan dari guru menjadi amat penting agar siswa dapat mengambil manfaat dari tayangan tersebut.

PAK melalui pembelajaran PKn yang didukung oleh pengintegrasian nilai-nilainya ke dalam berbagai mata pelajaran belumlah cukup. Masih diperlukan habituasi yang dapat dikemas dalam bentuk budaya sekolah. Bentuk-bentuk budaya sekolah antara lain kantin kejujuran, larangan menyontek, pengadaan kas kelas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan lain-lain.

Keberadaan kantin kejujuran secara substansi memberikan kontribusi dalam pembentukan pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi. Temuan menarik dari

praktik kantin kejujuran ini adalah: (1) kantin kejujuran yang berhasil dengan indikator adanya keuntungan dari tahun 2009-2011 berlokasi di kota kecil, sementara kantin yang kurang berhasil berada di kota besar. Keberhasilan kantin kejujuran disebabkan sistem pengelolaan, sosialisasi sekolah, dan dukungan orang tua. Khusus di SMPN B, keberhasilan kantin kejujuran karena didukung oleh budaya antimenyontek yang sudah ada jauh sebelum ada kantin kejujuran. Budaya semacam ini secara rutin dihabituasikan secara turun-temurun dari kakak-kakak kelas kepada adik-adiknya. Di SMPN C dengan menggunakan sistem terbuka penuh juga mendapatkan keuntungan selama periode Desember 2009 sampai dengan Juli 2011. Keberhasilan dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain: (1) sosialisasi yang terus menerus, jika ada kerugian pada hari tertentu maka pada saat doa bersama diumumkan bahwa di kantin kejujuran ada kehilangan barang dan mohon siswa mendoakan agar yang berbuat tidak jujur segera diberi keinsyafan, dan (2) keberadaan kantin kejujuran bagi siswa SMPN C menjadi kebanggaan dimanifestasikan dengan menceritakan kepada teman-temannya yang berbeda sekolah. Sedangkan faktor eksternal antara lain: (1) adanya dukungan dari orang tua. Orang tua sangat *mewanti-wanti* (menasehati dengan ditekankan) jangan sekali-kali tidak membayar atau curang pada saat membeli di kantin kejujuran, dan (2) lokasi sekolah yang ada di ibukota kecamatan dan lingkungan yang agamis diprediksi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan kantin kejujuran di SMPN C.

Kerugian kantin kejujuran di SMPN A dan SMPN D karena siswa tidak membayar sesuai dengan ketentuan dan kurangnya dalam sosialisasi kepada orang tua. Siswa yang tidak membayar bukan semata-mata tidak mempunyai uang tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh temannya sebagai bentuk solidaritas. Tidak jarang siswa justru saling menutupi ketika ada teman yang secara sengaja tidak membayar. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erikson (1963); Garbarino dan Brofenbrenner (1967); dan Kohlberg dan Lickona (1976). Dalam penelitian yang dilakukan Erikson (1963) bahwa anak usia 12-15 tahun pada masa *adolescence: Identity vs Role Confusion* (mencari identitas diri vs salah peran/kebingungan), di mana tidak membayar di kantin kejujuran merupakan bentuk pencarian identitas diri yang negatif sehingga dengan mudah dipengaruhi teman sejawat untuk me-

lakukan hal-hal yang negatif. Sementara dalam pandangan Garbarino dan Brofenbrenner (1967) bahwa anak pada usia 8-14 tahun merupakan tahap *peer-oriented morality* (memenuhi harapan lingkungan). Pada fase ini, lingkungan sebaya mulai memberikan pengaruh pada anak sehingga tindakannya akan menyesuaikan dengan teman sebaya agar dapat diterima dalam kelompok. Demikian juga dalam pandangan Kohlberg dan Lickona (1976) bahwa anak-anak pada usia 12-15 tahun masuk dalam tingkatan kedua (*Conventional*) pada *Stage Three*, yakni *Interpersonal accord and conformity (Social norms) (The good boy/good girl attitude)*. Tahap penyesuaian dengan kelompok atau orientasi untuk menjadi “anak manis”. Selanjutnya, terjadi sebuah proses perkembangan ke arah sosialitas dan moralitas kelompok. Kesadaran dan kepedulian atas kelompok akrab, serta tercipta sebuah penilaian akan dirinya dihadapan kelompok. Siswa yang membayar dan tidak membayar di kantin kejujuran bisa jadi mendapatkan pengaruh dari teman sebaya (*peer group*). Dalam satu kelompok ada siswa yang tidak membayar dan mengajak teman-temannya, jika tidak mau akan “dicap” sebagai anak yang penakut, tidak mempunyai solidaritas terhadap kelompok. Pola-pola semacam ini terjadi pada masa-masa usia 12-15 tahun.

Untuk itu, model kantin kejujuran akan lebih baik jika diawali dengan model induktif, yakni dengan membuat kantin-kantin di setiap kelas, dengan nama “pojok kejujuran”, artinya setiap kelas akan mempunyai satu kantin kejujuran yang menjadi tanggung jawab kelas yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk menghabituisasikan tingkah laku jujur, tanggung jawab, dan disiplin dalam lingkup yang kecil terlebih dahulu. Jika kantin kejujuran di tingkat kelas sudah berjalan dengan baik baru ditingkatkan ke area yang lebih luas yakni tingkat sekolah. Kantin kejujuran di tingkat kelas bertujuan untuk mempersiapkan mental siswa menuju ke kantin kejujuran tingkat sekolah.

Budaya lain yang layak untuk dikembangkan sebagai pendukung PAK di sekolah adalah gerakan antimenyontek. Keberhasilan budaya menyontek di SMPN B karena adanya konsistensi dalam menerapkan yang dilakukan guru. Meskipun menyontek bukanlah korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang, namun sebenarnya dalam arti yang lebih luas dapat dikategorikan sebagai “korupsi” yakni berbuat curang, tidak jujur, dan manipulatif. Menghabituisasikan budaya antimenyontek secara terus menerus, berjenjang pada semua tingkatan pendidikan merupakan

usaha dalam rangka menguatkan pendidikan karakter di sekolah mutlak diperlukan.

Penerapan kedisiplinan juga merupakan bentuk budaya yang mendukung PAK di sekolah. Kedisiplinan dalam arti yang luas bukan hanya ketepatan waktu masuk dan pulang jam sekolah, namun dalam dimensi yang lebih luas termasuk didalamnya ketepatan mengumpulkan tugas dalam berbagai mata pelajaran, menggunakan seragam dan atribut sesuai dengan ketentuan, penggunaan peralatan laboratorium, dan lain-lain. Beberapa variasi penerapan kedisiplinan di sekolah yang menjadi lokasi penelitian ini dapat dijadikan sebagai model. Di SMPN F, pelaksanaan kedisiplinan langsung di bawah kendali kepala sekolah. Diawali dengan membuat kebijakan tiga budaya yang akan dikembangkan yaitu: (1) disiplin tanpa diawasi, (2) bekerja tanpa diperintah, dan (3) tanggung jawab tanpa diminta. Wujud komitmen kepala sekolah untuk membudayakan kedisiplinan dengan cara terjun langsung memberikan contoh kepada siswa, guru, staf administrasi, dan petugas kebersihan. Misalnya, datang tepat waktu, memberitahu kepada wakil kepala sekolah jika ada keperluan pada saat jam sekolah, maupun pada waktu tertentu mengadakan supervisi di kelas tanpa mengurangi otoritas guru di kelas. Cara mendisiplinkan warga sekolah yang ada di SMPN D bisa juga dijadikan model. Kepala sekolah SMPN D menyadari bahwa kantin kejujuran kurang berhasil maka langkah yang diambil diawali dengan cara membuat komitmen untuk meningkatkan kejujuran melalui disiplin diri. Pengembangan 7 (tujuh) budaya, yaitu: (1) malu datang terlambat/pulang cepat, (2) malu melihat rekan sibuk melakukan aktivitas, (3) malu melanggar peraturan, (4) malu berbuat salah, (5) malu bekerja tidak berprestasi, (6) malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan (7) malu tidak berperan dalam mewujudkan kebersihan kantor/sekolah. Di SMPN D, dikembangkan budaya mengakui jika melanggar tata tertib. Pada tahap awal yang dikembangkan tentang disiplin diri siswa. Jika ada siswa yang datang terlambat atau tidak memakai atribut dan kelengkapan seragam sekolah secara sadar menghadap ke guru piket dan mengakui atau menunjukkan jenis pelanggarannya. Jika secara jujur mengakui maka akan mendapatkan keringanan dengan syarat pelanggarannya kurang dari tiga kali. Namun jika tidak mengakui dan diketahui guru piket makan akan mendapatkan hukuman lima poin pelanggaran di buku pribadi siswa. Usaha yang dilakukan SMPN D berhasil dengan meningkatkan kesadaran siswa untuk

mentaati tata tertib sekolah, dengan suka rela menemu guru piket jika merasa melakukan pelanggaran.

Kas kelas merupakan bentuk budaya yang dikembangkan di semua sekolah yang menjadi lokasi penelitian ini. Budaya ini merupakan ajang untuk pengelolaan anggaran dalam lingkungan yang paling kecil di sekolah. Kas kelas berasal dari, oleh, dan untuk warga kelas di bawah bimbingan wali kelas. Penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan secara terbuka setiap akhir bulan, sehingga diketahui peruntukan dan saldo setiap bulan. Keberadaan kas kelas memberikan lahan bagi siswa untuk melatih diri mengelola anggaran secara mandiri, tanggung jawab, dan menggunakan sesuai dengan keputusan bersama. Meskipun sederhana budaya semacam ini akan memberikan latihan secara praktis kepada siswa.

Menempatkan kejujuran sebagai habituasi pokok dalam PAK di sekolah yang kemudian dijabarkan ke dalam berbagai aktivitas kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler merupakan bentuk yang sangat tepat. Hal ini karena tujuan utama PAK di sekolah tidak dikonstruksi mampu melacak dan berani melaporkan kasus-kasus korupsi, tetapi lebih diarahkan pada pembentukan pola pikir, sikap, kesadaran, dan perilaku nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, terbuka, dapat dipercaya, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan pandangan Lickona (1991:13-18), jika penjiplakan/ketidakjujuran (*cheating*) dan semakin rendah tanggung jawab individu sebagai warga negara (*increasing self-centeredness and declining civic responsibility*) terjadi kalangan generasi muda maka hal itu merupakan tanda-tanda kehancuran suatu bangsa. Sementara Megawangi (2004:95) menambahkan pentingnya kejujuran/amana (*honesty*) dalam pengembangan karakter; yang diperkuat pendapat Brooks dan Goble (1997:112-117) fokus pendidikan karakter diarahkan pada nilai "dapat dipercaya (*trustworthy*), meliputi sifat jujur (*honesty*) dan integritas (*integrity*), memperlakukan orang lain dengan hormat (*treats people with respect*), dan bertanggung jawab (*responsibility*)". Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran merupakan modal utama dalam dalam pendidikan karakter di sekolah karena akan memberikan implikasi pada pengembangan nilai-nilai karakter yang lain.

Hasil penelitian yang dilakukan Mat Min (2009) di Malaysia, bahwa budaya sekolah seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan hormat-menghormati memberikan kontribusi dalam perilaku dan keberhasilan siswa dalam belajar. Hasil penelitian ini

membuktikan bahwa PAK yang dihabituisikan melalui budaya sekolah menjadi komponen penting dalam pembentukan karakter siswa.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan, simpulan yang dapat disampaikan adalah: (1) konstruksi guru PKn tentang korupsi di Indonesia sudah sampai pada tahap yang membahayakan sehingga upaya penegakkan hukum belumlah cukup, tetapi harus diimbangi dengan PAK yang dimasukkan dalam kurikulum sekolah secara tertintegrasikan atau inklusif sebagai bentuk gerakan sosiokultural-pedagogik, (2) konstruksi guru tentang korupsi dan antikorupsi memberikan andil yang besar kepada konstruksi siswa terhadap korupsi, di samping pengaruh dari media massa dan elektronik, (3) perangkat pembelajaran PAK melalui mata pelajaran PKn yang dikembangkan guru masih kurang mampu mewujudkan tiga dimensi kompetensi PKn, (4) PAK melalui pembelajaran PKn maupun berbagai mata pelajaran belumlah cukup, masih diperlukan habituasi yang dapat dikemas dalam bentuk budaya sekolah, melalui kantin kejujuran, larangan menyontek, pengadaan kas kelas, kedisiplinan, dan tanggung jawab, (5) PAK di sekolah melalui mata pelajaran PKn sebagai inti, pendorong, penggerak, dan ujung tombak yang diarahkan pada dampak instruksional dan pengiring, sedangkan mata pelajaran lain, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya sekolah diarahkan kepada dampak pengiring saja.

### SARAN

Berdasarkan atas hasil penelitian, pembahasan dan simpulan, saran yang diusulkan sebagai berikut. (1) Pentingnya pemahaman guru PKn secara komprehensif tentang konseptual-teoritis, praktis tentang korupsi dan antikorupsi secara mendalam dengan memanfaatkan dan mengelaborasi berbagai sumber. Di samping sebagai bentuk penguatan profesionalisme profesi juga dapat digunakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif baik dari sisi pengetahuan, keteguhan, kemampuan hidup, kecakapan, kepedulian, watak, dan perilaku antikorupsi kepada siswa sebagai warganegara muda yang kelak akan menjadi tulang punggung kelanjutan perjalanan bangsa ini akan pentingnya bahasa korupsi. (2) Nilai-nilai

PAK seperti kejujuran, larangan menyontek, pengadaaan kas kelas, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang dihabituasikan ke dalam berbagai aktivitas di sekolah penting untuk disosialisasikan kepada orang tua agar mendapatkan dukungan, sehingga ada sinkronisasi dan saling memberikan penguatan antara afektif yang dihabituasikan di sekolah dengan di rumah. (3) Kepada pemerintah atau lembaga yang diberi kewenangan untuk mengambil kebijakan dalam bidang pendidikan perlu memiliki kemauan yang kuat untuk melaksanakan dan menyebarluaskan PAK di sekolah. Pengintegrasian PAK ke dalam kurikulum sekolah formal dengan menggunakan pendekatan inklusif yang dilakukan secara cermat mulai saat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. (4) Para kepala sekolah untuk konsisten dan kontinyu mengembangkan budaya sekolah seperti kejujuran, larangan menyontek, pengadaaan kas kelas, kedisiplinan, dan tanggung jawab dan lain-lain ke dalam kehidupan sekolah.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, R. H. 1985. *Pemilihan dan Pengembangan Media untuk Pembelajaran*. Terjemahan oleh Yusufhadi Miarso, Slamet Sudarman, Yunarsih Kusdarmanto, Dewi Salma, Anung Haryono. 1987. Jakarta: CV. Rajawali.
- Brooks, B. D., and Goble, F. G. 1997. *The Case of Character Education: The Role of the School in Teaching Values and Virtue*. Los Angeles: Studio 4 Production.
- Budimansyah, D. 2008. Revitalisasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen). *Jurnal Acta Civicus*, I(2): 179-198.
- Bungin, B. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Center For Indonesian Civic Education Education. 1999. *Democratic Citizens in A Civic Society: Workshop Report*. Bandung: CICED.
- Center For Indonesian Civic Education Education. 2000. *A Needs-Assesment for New Indonesian Civic Education: A National Survey 1999-2000*. Bandung: CICED.
- Darmawan C., Kesuma, D., Permana, J. 2008. *Korupsi dan Pendidikan Antikorupsi*, Bandung: Pustaka Aulia Press.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds). 2009. *Handbook of Qualitative Research*, Terjemahan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, John Renaldi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. 2009. *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Surabaya: Dinas Pendidikan Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- Erikson, E.H. 1963. *Childhood and Society*. (2nd ed.). New York: Norton. ([http://psychology.about.com/od/psychosocialtheories/a/psychosocial\\_3.htm](http://psychology.about.com/od/psychosocialtheories/a/psychosocial_3.htm)), diakses, 19 Agustus 2009).
- Gagne, R. M. 1988. *The Conditioning of Learning*. New York: Holt, Rinerhart and Winston.
- Garbarino, J., Brofenbrenner, U. 1976. *The Socialization of Moral Judgment and behavior in Cross-Cultural Perspective: in Lickona (ed). Moral Development Behavior*. New York: Holt Rinehart and Winston.
- Gurgur, T. and Shah, A. 2000. Localization and Corruption: Panacea or a Pandora's Box. *Presented at the IMF Conference on Fiscal Decentralization*, Washington, DC, November 21, 2000.
- Hassan, F. 2004. *Pendidikan adalah Pembudayaan: dalam Pendidikan Manusia Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kompas.
- Heyneman, S. P. 2002. Defining the Influence of Education on Social Cohesion, *International Journal of Educational Policy, Research and Practice* Vol. 3 (Winter), pp. 73-97.
- Huberman, A. M., Miles, M. B. 2009. *Data Management and Analysis Method*. Dalam Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds). 2009. *Handbook of Qualitative Research*, Terjemahan Dariyatno, Badrus Samsul Fata, John Renaldi. 2009. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jain, A. K. 2001. Corruption: A Review. *Journal of Economic Survey*. XV(1): 60-89.
- Johnson, D. P. 1981. *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives*. Terjemahan oleh Robert M. Z. Lawang. 1986. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kerr, D. 1999. *Citizenship Education: an International Comparison*, London: National Foundation for Educational Research-NFER.
- Kohlberg, L., Lickona, T. 1976. *Moral stages and moralization: The cognitive-developmental approach. Moral Development and Behavior: Theory, Research and Social Issues*. Holt, NY: Rinehart and Winston.

- Komalasari, K., Budimansyah, D. 2008. Pengaruh Pembelajaran Kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Kompetensi Kewarganegaraan Siswa SMP. *Jurnal Acta Civicus*, II(1): 76-95.
- Lickona, T. 1991. *Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Megawangi, R. 2004. *Pendidikan Karakter: Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation.
- Mat Min, R. 2009. Budaya Sekolah: Implikasi terhadap Proses Pembelajaran secara Mengalami. *Jurnal Kemanusiaan*, XIII, Juni 2009: 63-78.
- Miles, M. B., & Huberman, A.M. 1993. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* (ed.2). Newbury Park, CA: Sage.
- Muhari. 2004. *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya: Unesa Press.
- Patton, M. Q. 1990. *Qualitative Evaluation and Research Methods* (2<sup>nd</sup> Ed). London: Sage Publication Ltd.
- Patton, M. Q. 2009. *How to Qualitative Methods in Evaluation*. Terjemahan oleh Budi Puspo Priyadi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Quah, Jon S. T. 2002. Comparing Anti-Corruption Measures in Asian Countries: Lessons to be learnt. *Asian Review of Public Administration*. XI(2).
- Rahardjo, S. 1999. Pendekatan dan Pengkajian Sosiologi terhadap Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, II(1): 4.
- Rahardjo, S. 1999. Sosiologi Pembangunan Peradilan Bersih dan Berwibawa. *Jurnal Ilmu Hukum*, II(1): 42.
- Ritzer, G., and Goodman, D. J. 2003. *Modern Sociological Theory, Sixth Edition*. Terjemahan oleh Alimandan. 2004. Jakarta: Fajar Interpretama Offset.
- Rusijono, Susanto, Supriyono, Murtedjo, Hariadi, E., Kusnanik, N. W., Kasrori, J. 2010. *Asesmen dan Penilaian*. Surabaya: Unesa Press.
- Supardan, D. 2009. Anatomi Korupsi dalam Perspektif Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia. *Journal of Historical Studies*, X(1): 113-129.
- Svensson, J. 2005. Eight Question Corruption. *Journal of Economic Perspectives*, IX(3): 34-35.
- Tella, R. D., Ades, A. 2007. The New Economics of Corruption: Survey an some New Results. *Political Studies*, XLV: 496-515.
- Zuriah, N. 2011. *Model Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Perguruan Tinggi Kota Malang)*. Disertasi tidak diterbitkan. Bandung: Pascasarjana.